

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Periode 2022–2024

Yolanda Br Marpaung^{1✉}, Rimbun C.D. Sidabutar², Danri Toni siboro³

Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2022–2024. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara yang berjumlah 33 daerah, yang terdiri atas 25 kabupaten dan 8 kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan total observasi sebanyak 99 data selama tiga tahun penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, yang menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah mampu mendorong alokasi belanja modal. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang mengindikasikan bahwa dana tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja operasional. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, karena penggunaannya secara langsung diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. **Kata kunci:** pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja modal.

Abstract

This study aims to analyze the effect of economic growth, Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK) on capital expenditure in district and municipal governments in North Sumatra Province during the 2022–2024 period. The population of this study includes all districts and municipalities in North Sumatra, totaling 33 regions, consisting of 25 districts and 8 cities. The sampling technique used is purposive sampling, with a total of 99 observations over three years. The data used in this study are secondary data obtained from Regional Budget Realization Reports (APBD), the Directorate General of Fiscal Balance, and the Central Bureau of Statistics (BPS). The analytical method employed is multiple linear regression to examine the influence of independent variables on the dependent variable. The results indicate that economic growth does not have a significant effect on capital expenditure. Regional Original Revenue (PAD) has a positive and significant effect on capital expenditure, indicating that increased regional fiscal independence can encourage higher capital expenditure allocation. Meanwhile, the General Allocation Fund (DAU) does not have a significant effect on capital expenditure, suggesting that these funds are more commonly used for operational expenditures. In contrast, the Special Allocation Fund (DAK) has a positive and significant effect on capital expenditure, as its allocation is specifically directed toward infrastructure development and public facilities.

Keywords: economic growth, Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), capital expenditure.

Copyright (c) 2026 Yolanda Br Marpaung

✉ Corresponding author :

Email Address : yolanda.marpaung@student.uhn.ac.id

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah serta pengelolaan belanja yang berkualitas. Belanja modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, merupakan instrumen investasi pemerintah daerah yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur dasar, fasilitas layanan publik, serta aset strategis yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Oleh karena itu, belanja modal memiliki peranan penting dalam meningkatkan kapasitas fisik daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan mutu layanan publik dan daya saing wilayah, kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting dalam menentukan kapasitas daerah dalam melakukan belanja modal secara berkelanjutan (Indrianingrum & Priyono, 2023). Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya serta efektivitas kebijakan fiskal yang mampu meningkatkan output ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Sari & Wirama, 2020). Pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal sehingga memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mendanai pembangunan, termasuk belanja modal.

Namun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan belanja modal yang sejalan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prioritas anggaran yang lebih besar pada belanja rutin, tekanan kebutuhan jangka pendek, serta lemahnya perencanaan pembangunan dapat menyebabkan alokasi belanja produktif menjadi berkurang atau bergeser ke belanja konsumtif (Rahmadhani, 2019). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar diiringi dengan komitmen anggaran yang memadai untuk belanja modal, mengingat peran belanja modal sangat krusial dalam mendukung pembangunan fisik dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang sebagai indikator utama kemandirian keuangan daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi fiskal lokal melalui pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah (Adyatma & Oktaviani, 2019). Peningkatan PAD seharusnya dapat memperluas ruang fiskal sehingga pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, yang mengindikasikan bahwa daerah dengan PAD yang tinggi cenderung mengalokasikan dana lebih besar untuk investasi fisik (Yustriawan, 2021). Namun demikian, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa PAD tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas pengelolaan serta prioritas anggaran yang lebih condong pada belanja rutin (Sari et al., 2019; Puba & Gulo, 2022).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen utama dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan fiskal serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Secara teoritis, DAU memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga dapat mendorong peningkatan belanja modal, terutama bagi daerah dengan PAD yang relatif rendah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Romadhon & Aji, 2021; Heriston & Putri, 2020). Namun, hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa DAU tidak selalu berpengaruh signifikan karena sebagian besar alokasinya digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan kebutuhan rutin lainnya (Sari & Wirama, 2020; Novita et al., 2022).

Selain DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan khusus di daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik dan sektor prioritas (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005). DAK memiliki keterkaitan yang erat dengan belanja modal karena penggunaannya secara eksplisit diarahkan untuk pembangunan aset daerah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal karena digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (Sari & Wirama, 2020; Heriston & Putri, 2020). Namun demikian, pengaruh DAK tidak selalu konsisten, terutama apabila pemanfaatannya tidak optimal atau diarahkan pada kegiatan non-fisik (Sari & Wirama, 2020).

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran, seperti tanah, gedung, jalan, irigasi, jaringan, serta peralatan lainnya yang mendukung pembangunan daerah (PP No. 71 Tahun 2010). Secara empiris, belanja modal memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan tingkat kemandirian fiskal daerah, meskipun besarnya pengaruh tersebut dapat berbeda antar wilayah.

Secara regional, hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pengaruh variabel fiskal terhadap belanja modal. Di Sumatera Utara, PAD terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAU tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan (Yustriawan, 2021). Sementara itu, penelitian di wilayah lain seperti Jawa Timur menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara umum berpotensi meningkatkan belanja modal, meskipun pengaruh masing-masing variabel berbeda tergantung karakteristik daerah dan periode penelitian (Putri & Mauliyah, 2022). Di wilayah Banten, hasil penelitian menunjukkan ketidakkonsistenan pengaruh variabel fiskal terhadap belanja modal, yang dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan tata kelola keuangan daerah (Darmawati et al., 2025).

Secara teoritis, hubungan antara PAD, DAU, DAK, dan belanja modal dapat dijelaskan melalui teori keagenan dan desentralisasi fiskal. Dalam teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik guna memenuhi kepentingan masyarakat sebagai prinsipal melalui penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur (Citra & Kurnia, 2024). Sementara itu, dalam kerangka desentralisasi fiskal, kombinasi antara pendapatan lokal dan dana transfer diharapkan mampu meningkatkan kemandirian serta efektivitas daerah dalam membiayai pembangunan.

Fenomena empiris di Sumatera Utara menunjukkan bahwa selama periode 2022–2024 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 4,73% pada tahun 2022 menjadi 5,03% pada tahun 2024. Selain itu, PAD, DAU, dan DAK juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, di sisi lain, belanja modal justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan pergeseran alokasi anggaran dari belanja modal ke belanja operasional atau belanja rutin, yang berpotensi menghambat pembangunan jangka panjang (Handayani, 2020).

Selain itu, proporsi DAU yang masih lebih besar dibandingkan PAD menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah di Sumatera Utara masih relatif rendah, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kapasitas fiskal, belum tentu diikuti dengan peningkatan alokasi belanja modal secara optimal.

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya serta fenomena empiris yang terjadi menunjukkan adanya *research gap* dan *theory gap* dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal. Selain itu, periode penelitian 2022–2024 merupakan fase pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang ditandai dengan perubahan struktur anggaran, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara selama periode 2022–2024. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal, khususnya dalam optimalisasi pendapatan daerah serta pemanfaatan dana transfer guna meningkatkan belanja modal dan kualitas pembangunan daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Penelitian ini didasarkan pada teori keagenan (*agency theory*), yang menjelaskan hubungan antara pihak pemberi mandat (*principal*) dan pihak penerima mandat (*agent*). Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat berperan sebagai *principal*, sedangkan pemerintah daerah bertindak sebagai *agent* yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pengelolaan tersebut mencakup pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pengalokasian belanja modal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Teori keagenan menegaskan bahwa hubungan antara *principal* dan *agent* berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena pihak agen tidak selalu bertindak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan pihak prinsipal (Harris & Raviv, 1978). Dalam konteks keuangan daerah, konflik tersebut dapat tercermin dalam pengambilan keputusan anggaran yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan publik, misalnya ketika alokasi anggaran lebih banyak diarahkan pada belanja rutin dibandingkan belanja produktif. Oleh sebab itu, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting agar sumber daya publik benar-benar digunakan untuk tujuan pembangunan.

Dalam perspektif penelitian ini, teori keagenan relevan untuk menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengelola PAD, DAU, dan DAK secara optimal agar dapat diwujudkan dalam bentuk belanja modal yang produktif. Belanja modal menjadi salah satu bentuk nyata pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat karena melalui belanja tersebut pemerintah menyediakan infrastruktur, fasilitas umum, dan sarana pelayanan publik. Dengan demikian, teori keagenan memberikan dasar konseptual bahwa kualitas pengelolaan pendapatan daerah dan transfer fiskal akan memengaruhi besar kecilnya alokasi belanja modal (Ayem & Pratama, 2018).

Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah mampu mengatur dan mengelola sumber dayanya sendiri secara lebih efektif sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan ruang untuk meningkatkan pendapatan daerah, memanfaatkan transfer pusat, serta merancang prioritas belanja yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Secara substantif, desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, mempercepat pembangunan daerah, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan PAD sebagai sumber utama pendapatan lokal, sekaligus memanfaatkan dana transfer seperti DAU dan DAK untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Belanja modal kemudian menjadi salah satu instrumen penting karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat (Silalahi et al., 2025).

Selain itu, desentralisasi fiskal juga berfungsi sebagai mekanisme pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Tidak semua daerah memiliki kapasitas PAD yang sama, sehingga pemerintah pusat menyalurkan transfer fiskal, khususnya DAU, untuk mengurangi kesenjangan horizontal antar daerah. Dengan demikian, teori desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa kombinasi antara PAD, DAU, dan DAK seharusnya dapat mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, terutama belanja modal, sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang efektif (Yustriawan, 2021).

Teori Anggaran Berimbang (Balanced Budget Theory)

Teori anggaran berimbang menekankan pentingnya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagai syarat utama terciptanya stabilitas fiskal. Dalam konteks pemerintahan daerah, keseimbangan anggaran menunjukkan bahwa belanja yang dilakukan pemerintah harus disesuaikan dengan kemampuan penerimaan daerah agar tidak menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan. Prinsip ini penting karena pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan peningkatan belanja, tetapi juga pengelolaan keuangan yang sehat dan terencana.

Menurut pandangan teori ini, penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, DAU, dan DAK harus dapat dialokasikan secara proporsional untuk mendukung kebutuhan operasional sekaligus investasi jangka panjang melalui belanja modal. Jika keseimbangan fiskal dapat dijaga, maka pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk mengarahkan anggaran pada pembangunan infrastruktur dan aset publik tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. Dalam hal ini, belanja modal dipandang sebagai bentuk pengeluaran yang strategis karena memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian daerah (Krugman, 2018).

Dengan demikian, teori anggaran berimbang memberikan pijakan bahwa pengelolaan penerimaan daerah yang baik akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan ruang fiskal untuk belanja modal. Artinya, semakin baik keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, semakin besar peluang daerah untuk membiayai pembangunan secara berkelanjutan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang tercermin dalam kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan meningkatnya aktivitas perekonomian, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah (Darmawati et al., 2025).

Dalam konteks pemerintahan daerah, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menunjukkan kinerja ekonomi wilayah, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi akan memperluas basis pajak dan retribusi daerah, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pemerintah daerah. Kondisi ini memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas alokasi belanja, termasuk belanja modal, yang digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik (Febriansyah Putra et al., 2023).

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai variabel yang secara teoritis mampu memengaruhi belanja modal. Ketika ekonomi daerah tumbuh, kebutuhan terhadap sarana pendukung aktivitas ekonomi juga meningkat, sehingga pemerintah daerah cenderung meningkatkan investasi publik dalam bentuk belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

PAD memiliki arti penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena menjadi indikator kemandirian fiskal. Semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah, semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri tanpa bergantung secara berlebihan pada pemerintah pusat. Dalam perspektif pembangunan daerah, PAD memberikan ruang fiskal yang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas anggaran, termasuk untuk belanja modal yang bersifat produktif dan berjangka panjang (Ginting et al., 2025).

Oleh karena itu, PAD dipandang sebagai salah satu variabel utama yang memengaruhi belanja modal. Peningkatan PAD menunjukkan meningkatnya kapasitas fiskal daerah, yang pada gilirannya dapat memperbesar alokasi anggaran pada pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana publik.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *block grant*, yang berarti penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Secara konseptual, DAU berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, terutama bagi daerah yang memiliki PAD rendah. Dengan adanya DAU, pemerintah daerah tetap memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan publik. Selain untuk mendukung belanja rutin, DAU juga berpotensi digunakan untuk memperkuat belanja pembangunan, termasuk belanja modal, apabila pemerintah daerah mampu mengelola ruang fiskalnya secara efektif (Putri & Mauliyah, 2022).

Dalam penelitian ini, DAU dipahami sebagai salah satu bentuk dukungan fiskal dari pemerintah pusat yang dapat meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Oleh sebab itu, semakin besar DAU yang diterima daerah, maka secara teoritis semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal, meskipun dalam praktiknya pengaruh tersebut dapat dipengaruhi oleh prioritas penggunaan anggaran.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berbeda dengan DAU yang bersifat umum, DAK memiliki sifat yang lebih spesifik karena penggunaannya diarahkan pada sektor-sektor tertentu, terutama yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan infrastruktur lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005).

Karakteristik DAK yang diarahkan pada kegiatan fisik menjadikan dana ini sangat erat kaitannya dengan belanja modal. DAK pada dasarnya merupakan instrumen fiskal yang dirancang untuk membantu daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan DAK secara teoritis akan mendorong peningkatan belanja modal, karena sebagian besar penggunaannya memang ditujukan untuk pembiayaan aset tetap atau pembangunan fisik (Darmawati et al., 2025).

Dengan demikian, DAK merupakan variabel yang sangat relevan dalam menjelaskan variasi belanja modal antar daerah. Semakin besar alokasi DAK yang diterima daerah, semakin besar pula kemungkinan pemerintah daerah menambah pengeluaran untuk investasi publik.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Aset tersebut dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset fisik lain yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (PP No. 71 Tahun 2010).

Belanja modal memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang. Berbeda dengan belanja operasional yang manfaatnya habis dalam satu periode, belanja modal bersifat investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, tingkat belanja modal suatu daerah sering digunakan untuk menilai sejauh mana komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan yang produktif (Putri et al., 2024).

Dalam penelitian ini, belanja modal diposisikan sebagai variabel dependen, karena besar kecilnya alokasi belanja modal diperkirakan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah dan kapasitas fiskalnya, baik yang berasal dari PAD maupun transfer fiskal dari pemerintah pusat.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan dasar empiris yang penting dalam menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan belanja modal. Berbagai studi menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing variabel terhadap belanja modal tidak selalu konsisten di setiap daerah, yang mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik fiskal, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran antar wilayah.

Ayem dan Pratama (2018) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sementara PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah dan dukungan transfer pusat memiliki peran yang lebih nyata dibandingkan pertumbuhan ekonomi dalam menjelaskan belanja modal.

Syukri dan Hinaya (2019) juga menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Hasil tersebut memperkuat dugaan bahwa kemampuan fiskal daerah lebih menentukan alokasi belanja modal dibandingkan indikator ekonomi makro semata.

Penelitian Febriansyah Putra et al. (2023) menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa pembangunan daerah masih sangat bergantung pada kekuatan fiskal nyata yang tercermin dalam pendapatan daerah dan transfer pemerintah pusat.

Darmawati et al. (2025) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap

belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa belanja modal lebih responsif terhadap sumber penerimaan fiskal yang secara langsung dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Ginting et al. (2025) yang mengkaji pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap struktur belanja daerah di Sumatera Utara menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, termasuk belanja modal. DAU dan DAK juga menunjukkan pengaruh yang signifikan, yang menguatkan pentingnya transfer fiskal dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya di wilayah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat.

Secara umum, telaah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK cenderung memiliki pengaruh yang lebih konsisten terhadap belanja modal dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil yang berbeda-beda antar studi menunjukkan masih adanya *research gap*, terutama pada konteks wilayah Sumatera Utara dan periode terbaru setelah pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris yang lebih mutakhir mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal kabupaten/kota di Sumatera Utara periode 2022–2024.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa belanja modal pemerintah daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah dan kapasitas fiskalnya. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya dapat memperluas basis penerimaan daerah dan meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur publik. PAD mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari potensi lokal dan menunjukkan tingkat kemandirian fiskal. Sementara itu, DAU dan DAK merupakan bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat yang dapat memperkuat kapasitas pendanaan daerah dalam membiayai pembangunan.

Secara konseptual, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin besar kebutuhan pemerintah daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui pembangunan sarana dan prasarana. Semakin besar PAD, semakin luas ruang fiskal pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja untuk pembangunan. Demikian pula, peningkatan DAU dan DAK akan menambah kapasitas keuangan daerah, sehingga berpotensi meningkatkan belanja modal, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh prioritas kebijakan anggaran masing-masing daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempatkan pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi belanja modal sebagai variabel dependen pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas produksi dan distribusi barang serta jasa dalam suatu daerah. Daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya memiliki dinamika ekonomi yang lebih kuat, peningkatan investasi, dan kebutuhan infrastruktur yang lebih besar. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mampu menopang keberlanjutan pertumbuhan tersebut.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan penerimaan pemerintah daerah. Peningkatan ini kemudian memberi peluang bagi pemerintah untuk memperbesar alokasi anggaran pada belanja produktif, terutama belanja modal. Belanja modal diperlukan untuk membangun jalan, jembatan, fasilitas

kesehatan, sarana pendidikan, dan berbagai aset publik lain yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dengan belanja modal, meskipun pada beberapa konteks pengaruh tersebut tidak selalu signifikan. Dalam kerangka penelitian ini, pertumbuhan ekonomi tetap diasumsikan berpengaruh positif terhadap belanja modal karena semakin tinggi tingkat aktivitas ekonomi, semakin besar pula kebutuhan daerah terhadap pembangunan infrastruktur yang memadai (Febriansyah Putra et al., 2023; Darmawati et al., 2025). Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

PAD merupakan cerminan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dari sumber-sumber pendapatan lokal. Daerah dengan PAD yang tinggi menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik, sehingga memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan prioritas pengeluaran anggaran.

Secara teoritis, peningkatan PAD memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja yang bersifat produktif. Salah satu bentuk pengeluaran produktif tersebut adalah belanja modal, yang digunakan untuk membangun aset tetap dan infrastruktur publik. Dengan demikian, semakin tinggi PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memperluas investasi publik dalam bentuk belanja modal.

Penelitian terdahulu secara umum menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Daerah dengan kemampuan menggali potensi pendapatan lokal yang tinggi cenderung lebih mampu meningkatkan kualitas pembangunan daerah melalui pengeluaran investasi jangka panjang (Pratama, 2018; Ginting et al., 2025). Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

DAU merupakan transfer fiskal dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Sebagai dana yang bersifat umum, DAU dapat digunakan pemerintah daerah untuk mendanai berbagai kebutuhan pengeluaran sesuai prioritas daerah masing-masing.

Secara teoritis, peningkatan DAU akan memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga memberi peluang untuk menambah belanja pembangunan, termasuk belanja modal. Meskipun dalam praktiknya DAU sering kali digunakan untuk belanja rutin, keberadaan dana ini tetap penting karena dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih longgar bagi daerah. Apabila pemerintah daerah mampu mengelola prioritas anggaran secara baik, maka DAU dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal, terutama di daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada transfer pusat. Hal ini menegaskan bahwa DAU merupakan salah satu sumber pendanaan penting dalam mendukung belanja pembangunan daerah (Putri & Mauliyah, 2022; Ginting et al., 2025). Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

DAK merupakan dana transfer yang secara khusus dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional, terutama pembangunan fisik dan pelayanan

dasar. Karakteristik DAK yang spesifik membuat dana ini sangat erat kaitannya dengan belanja modal, karena sebagian besar penggunaannya diarahkan pada pengadaan aset tetap, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan publik.

Secara teoritis, semakin besar DAK yang diterima daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk membiayai proyek pembangunan fisik. Dengan demikian, peningkatan DAK akan secara langsung mendorong peningkatan belanja modal. Hal ini berbeda dengan DAU yang lebih fleksibel, karena DAK memang dirancang untuk mendukung kegiatan fisik yang produktif dan berjangka panjang.

Temuan empiris dari berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa DAK cenderung berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pengaruh ini relatif lebih kuat karena arah penggunaan DAK lebih jelas dan terfokus pada pembangunan infrastruktur publik (Darmawati et al., 2025; Pratama, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan menguji hubungan antarvariabel secara objektif berdasarkan data numerik yang dianalisis secara statistik. Sementara itu, desain eksplanatori dipilih karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap variabel dependen, yaitu belanja modal. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas baik secara parsial maupun simultan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten dan 8 kota, sehingga total unit analisis dalam penelitian ini berjumlah 33 pemerintah daerah. Populasi tersebut dipilih karena seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki dokumen keuangan daerah dan data pertumbuhan ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian selama periode pengamatan tahun 2022 hingga 2024.

Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan meliputi pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki data lengkap mengenai belanja modal, PAD, DAU, DAK, dan pertumbuhan ekonomi selama periode 2022-2024, serta data tersebut tersedia dalam publikasi resmi dan dapat diakses secara konsisten. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian berupa data panel dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara selama tiga tahun pengamatan, sehingga total observasi penelitian berjumlah 99 observasi.

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui dokumen, laporan resmi, dan publikasi lembaga pemerintah. Penggunaan data sekunder dipandang sesuai karena variabel-variabel dalam penelitian ini

merupakan indikator fiskal dan ekonomi daerah yang telah terdokumentasi secara sistematis oleh instansi resmi, sehingga lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan validitas data.

Sumber data penelitian ini meliputi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau laporan realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2022–2024, publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk data transfer fiskal daerah, serta publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi daerah. Data PAD, DAU, DAK, dan belanja modal diperoleh dari laporan keuangan daerah dan basis data keuangan pemerintah daerah, sedangkan data pertumbuhan ekonomi diperoleh dari data PDRB atas dasar harga konstan yang dipublikasikan oleh BPS.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengunduh, mencatat, dan menelaah dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Tahapan pengumpulan data dimulai dari identifikasi dokumen yang dibutuhkan, verifikasi kesesuaian data berdasarkan periode pengamatan, pengecekan keseragaman satuan pengukuran, hingga pengkodean data ke dalam lembar kerja penelitian untuk selanjutnya diolah menggunakan alat analisis statistik.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel diperlukan agar setiap konsep dalam penelitian dapat diukur secara empiris dan diolah secara statistik. Seluruh variabel dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio karena dinyatakan dalam satuan angka yang memiliki nilai absolut dan dapat dibandingkan secara proporsional. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal, sedangkan variabel independennya terdiri atas pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK.

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Belanja modal mencakup belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya. Dalam penelitian ini, belanja modal diukur berdasarkan nilai nominal belanja modal tahunan yang tercantum dalam laporan APBD atau laporan realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara selama periode 2022–2024, dengan satuan rupiah.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Variabel ini digunakan untuk mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi daerah. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan PDRB tahunan kabupaten/kota di Sumatera Utara yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik selama periode 2022–2024, dengan satuan persen. Secara matematis, pertumbuhan ekonomi dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = ((\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}) / \text{PDRB}_{t-1}) \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi daerah itu sendiri, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam penelitian ini, PAD diukur berdasarkan nilai nominal PAD tahunan yang tercantum dalam dokumen APBD atau laporan realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara selama tahun 2022–2024, dengan satuan rupiah. Secara konseptual, PAD dirumuskan sebagai:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penelitian ini, DAU diukur berdasarkan nilai nominal DAU tahunan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam publikasi resmi Kementerian Keuangan dan laporan keuangan daerah selama periode 2022–2024, dengan satuan rupiah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) didefinisikan sebagai dana transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan pelayanan dasar. Dalam penelitian ini, DAK diukur berdasarkan nilai nominal DAK tahunan yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara selama periode 2022–2024, dengan satuan rupiah, berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan dan dokumen keuangan daerah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis. Seluruh proses analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Gambaran tersebut meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel. Melalui analisis ini, peneliti dapat memahami sebaran data dan kecenderungan umum masing-masing variabel sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut.

Sebelum melakukan analisis regresi, penelitian ini terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara tepat. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian ini penting karena distribusi residual yang normal akan mendukung validitas pengujian statistik, terutama pada ukuran sampel yang terbatas. Uji normalitas dapat dilakukan melalui analisis grafik *normal probability plot* dan/atau uji statistik seperti Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, sesuai dengan kebutuhan analisis.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya multikolinearitas yang kuat. Deteksi multikolinearitas dilakukan melalui nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan residual pada pengamatan lainnya. Uji ini penting terutama karena data penelitian menggunakan observasi yang tersusun menurut waktu. Autokorelasi dapat dideteksi melalui uji Durbin-Watson, dengan ketentuan bahwa nilai statistik yang berada di sekitar angka 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi yang berarti.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang menunjukkan kondisi homoskedastisitas, yaitu varians residual yang relatif konstan. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui scatterplot atau uji Glejser, dengan melihat apakah terdapat pola tertentu pada sebaran residual.

Model Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi linear berganda dipilih karena penelitian ini melibatkan lebih dari satu variabel bebas yang diduga memengaruhi belanja modal. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

β_1 - β_4 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

X1 = Pertumbuhan Ekonomi

X2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X3 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X4 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

ε = Error term

Melalui model tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap belanja modal, baik secara parsial maupun simultan.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui koefisien determinasi, uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t). Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang semakin mendekati satu menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang semakin baik, sedangkan nilai yang mendekati nol menunjukkan bahwa kemampuan penjelasan model relatif terbatas.

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tingkat alpha 5 persen. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen tersebut dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja modal. Analisis dilakukan secara deskriptif dan inferensial untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengujian statistik dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis melalui uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi.

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian agar lebih mudah dipahami dan informatif (Ghozali, 2021). Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Data penelitian terdiri atas 99 observasi yang berasal dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2022–2024.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	99	3.11	5.36	4.6655	.48309
PAD (X2)	99	3.18	5.58	4.0340	.45669
DAU (X3)	99	2.97	5.29	4.7571	.24945
DAK (X4)	99	2.56	5.53	4.2544	.45655
Belanja Modal (Y)	99	3.31	5.37	4.2549	.28803
Valid N (listwise)	99				

Sumber: Diolah oleh SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, variabel pertumbuhan ekonomi (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 4,6655 dengan nilai minimum 3,11 dan nilai maksimum 5,36 serta standar deviasi sebesar 0,48309. Nilai maksimum tercatat pada Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, sedangkan nilai minimum terdapat pada Kota Gunungsitoli tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Utara selama periode penelitian relatif stabil, walaupun masih terdapat variasi antar daerah.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 4,0340, nilai minimum 3,18, nilai maksimum 5,58, dan standar deviasi sebesar 0,45669. Nilai maksimum PAD tercatat pada Kota Medan tahun 2024, sedangkan nilai minimum berada pada Kabupaten Nias Barat tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan kapasitas fiskal daerah dalam menggali potensi pendapatan lokal.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) (X3) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,7571 dengan nilai minimum 2,97, nilai maksimum 5,29, dan standar deviasi sebesar 0,24945. Nilai maksimum DAU tercatat pada Kota Medan tahun 2024, sementara nilai minimum berada pada Kabupaten Asahan tahun 2024. Standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa sebaran DAU antar daerah cenderung lebih homogen dibandingkan variabel lainnya.

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) (X4) memiliki nilai rata-rata sebesar 4,2544, dengan nilai minimum 2,56, nilai maksimum 5,53, dan standar deviasi sebesar 0,45655. Nilai maksimum terdapat pada Kabupaten Dairi tahun 2022, sedangkan nilai minimum terdapat pada Kabupaten Asahan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi DAK antar daerah cukup beragam sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing daerah.

Sementara itu, belanja modal (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 4,2549, dengan nilai minimum 3,31, nilai maksimum 5,37, dan standar deviasi sebesar 0,28803. Nilai maksimum tercatat pada Kota Medan tahun 2023, sedangkan nilai minimum terdapat pada Kota Padangsidimpuan. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan kemampuan daerah dalam mengalokasikan belanja modal, meskipun secara umum variasinya masih tergolong moderat.

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat statistik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	Unstandardized Residual
N	99
Normal Parameters ^{a,b} Mean	.0000000
Std. Deviation	.21841495
Most Extreme Differences Absolute	.080
Positive	.080
Negative	-.054
Test Statistic	.080
Asymp. Sig. (2-tailed)	.121 ^c

Keterangan:

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Diolah oleh SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,121, yaitu lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	1.525	.464		3.289	.001		
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	.004	.050	.007	.082	.935	.878	1.140
PAD (X2)	.295	.058	.468	5.075	.000	.720	1.389
DAU (X3)	.174	.105	.150	1.650	.102	.736	1.358
DAK (X4)	.163	.051	.259	3.208	.002	.941	1.063

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber: Diolah oleh SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.652 ^a	.425	.400	.22301	1.003

Keterangan:

a. Predictors: (Constant), DAK (X4), PAD (X2), Pertumbuhan Ekonomi (X1), DAU (X3)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber: Diolah oleh SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 4, nilai Durbin-Watson sebesar 1,003. Pada jumlah observasi 99, jumlah variabel independen 4, dan tingkat signifikansi 5%, nilai tersebut lebih kecil dari batas bawah (*dl*), sehingga menunjukkan adanya autokorelasi positif dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi masih mengalami masalah autokorelasi sehingga hasil analisis perlu diinterpretasikan dengan hati-hati.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	.082	.289		.285	.776
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	-.020	.031	-.068	-.636	.526
PAD (X2)	.064	.036	.207	1.759	.082
DAU (X3)	.022	.066	.038	.328	.744
DAK (X4)	-.043	.032	-.140	-1.359	.178

a. Dependent Variable: abs

Sumber: Diolah oleh SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 5, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	1.525	.464		3.289	.001		
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	.004	.050	.007	.082	.935	.878	1.140
PAD (X2)	.295	.058	.468	5.075	.000	.720	1.389
DAU (X3)	.174	.105	.150	1.650	.102	.736	1.358
DAK (X4)	.163	.051	.259	3.208	.002	.941	1.063

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber: Diolah oleh SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 6, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,525 + 0,004X1 + 0,295X2 + 0,174X3 + 0,163X4 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 1,525 berarti apabila pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK dianggap konstan, maka nilai belanja modal sebesar 1,525.

Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,004 menunjukkan arah hubungan positif, tetapi tidak signifikan. Koefisien regresi PAD sebesar 0,295 menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Koefisien regresi DAU sebesar 0,174 juga menunjukkan arah positif, namun tidak signifikan. Adapun koefisien regresi DAK sebesar 0,163 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Tabel 7. Hasil Uji t Parsial

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	1.525	.464		3.289	.001		
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	.004	.050	.007	.082	.935	.878	1.140
PAD (X2)	.295	.058	.468	5.075	.000	.720	1.389
DAU (X3)	.174	.105	.150	1.650	.102	.736	1.358
DAK (X4)	.163	.051	.259	3.208	.002	.941	1.063

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber: Diolah oleh SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 7, pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,935, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sehingga hipotesis pertama ditolak.

PAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sehingga hipotesis kedua diterima.

DAU memiliki nilai signifikansi sebesar 0,102, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sehingga hipotesis ketiga ditolak.

DAK memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sehingga hipotesis keempat diterima.

Tabel 8. Uji F Simultan

ANOVAa	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3.455	4	.864	17.367	.000b
Residual	4.675	94	.050		
Total	8.130	98			

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

b. Predictors: (Constant), DAK (X4), PAD (X2), Pertumbuhan Ekonomi (X1), DAU (X3)

Sumber: Diolah oleh SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 8, nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.652a	.425	.400	.22301	1.003

Keterangan:

a. Predictors: (Constant), DAK (X4), PAD (X2), Pertumbuhan Ekonomi (X1), DAU (X3)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber: Diolah oleh SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 9, nilai *R Square* sebesar 0,425 menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi belanja modal sebesar 42,5%, sedangkan sisanya sebesar 57,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 7, pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,935 yang lebih besar dari 0,05, dengan koefisien regresi sebesar 0,004. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal ditolak.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi suatu daerah yang seharusnya dapat meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diikuti dengan meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur dan layanan publik. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Sumatera Utara belum secara langsung diikuti oleh peningkatan alokasi belanja modal.

Kondisi ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Selain itu, pemerintah daerah kemungkinan masih

memprioritaskan belanja rutin dibandingkan belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pratama (2018), Hinaya (2019), dan Febriansyah Putra et al. (2023), yang juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 7, PAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien regresi sebesar 0,295. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal. PAD merefleksikan kemandirian fiskal daerah, sehingga daerah dengan PAD yang tinggi memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

Temuan ini sejalan dengan teori kemandirian fiskal daerah dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa PAD merupakan salah satu faktor yang paling konsisten dalam memengaruhi belanja modal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Ginting (2025), Pratama (2018), dan Febriansyah Putra et al. (2023), yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 7, DAU memiliki nilai signifikansi sebesar 0,102 yang lebih besar dari 0,05, dengan koefisien regresi sebesar 0,174. Hal ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal ditolak.

Secara teoritis, DAU merupakan instrumen transfer fiskal dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. DAU seharusnya dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan DAU belum mampu mendorong peningkatan belanja modal secara signifikan.

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh penggunaan DAU yang lebih banyak dialokasikan untuk membiayai belanja operasional, seperti belanja pegawai dan kebutuhan rutin pemerintahan daerah, dibandingkan untuk belanja modal. Dengan demikian, walaupun DAU meningkat, tambahan dana tersebut belum tentu diarahkan pada pembangunan fisik. Jadi, berdasarkan hasil penelitian ini, DAU memiliki arah hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 7, DAK memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien regresi sebesar 0,163. Hal ini menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian, hipotesis keempat diterima.

Hasil ini menunjukkan bahwa DAK merupakan salah satu faktor yang secara nyata mendorong peningkatan belanja modal daerah. Hal ini dapat dipahami karena DAK merupakan dana transfer yang penggunaannya telah diarahkan secara khusus untuk mendanai kegiatan prioritas nasional, terutama pembangunan fisik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sarana publik lainnya.

Karena sifat penggunaannya yang lebih spesifik dibandingkan DAU, DAK memiliki hubungan yang lebih langsung dengan belanja modal. Oleh sebab itu, semakin besar alokasi DAK yang diterima daerah, semakin besar pula potensi peningkatan belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pratama (2018), Darmawati et al. (2025), dan Ginting (2025), yang juga menemukan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan 33 kabupaten/kota sebagai sampel dengan total 99 observasi dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah belum secara langsung diikuti oleh peningkatan alokasi anggaran belanja modal, sehingga hipotesis pertama ditolak.

Selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar PAD yang dimiliki pemerintah daerah, semakin besar pula kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal. Dengan demikian, PAD menjadi faktor yang penting dalam mendorong peningkatan investasi pemerintah daerah melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik, sehingga hipotesis kedua diterima.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Meskipun DAU memiliki arah hubungan positif, pengaruhnya tidak cukup kuat secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa DAU yang diterima pemerintah daerah cenderung lebih banyak digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan belanja rutin dibandingkan untuk belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.

Berbeda dengan DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menunjukkan bahwa DAK merupakan salah satu instrumen transfer fiskal yang efektif dalam mendorong peningkatan belanja modal daerah, terutama karena penggunaannya lebih diarahkan pada pembangunan fisik, infrastruktur, dan fasilitas publik. Dengan demikian, hipotesis keempat diterima.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara periode 2022–2024 lebih dipengaruhi oleh faktor fiskal, khususnya PAD dan DAK, dibandingkan oleh pertumbuhan ekonomi dan DAU. Temuan ini menegaskan bahwa kapasitas fiskal daerah dan karakteristik dana transfer tertentu memiliki peran yang lebih nyata dalam menentukan besarnya alokasi belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan yang ada, beberapa saran dapat diajukan. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi pendapatan lokal agar ruang fiskal yang dimiliki semakin besar dan dapat diarahkan untuk meningkatkan belanja modal. Selain itu, pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dilakukan secara lebih efektif agar tidak hanya berfokus pada pembiayaan belanja operasional, tetapi juga dapat mendukung belanja modal yang bersifat produktif. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga perlu terus dimaksimalkan karena terbukti memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan belanja modal.

Bagi pemerintah pusat, hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas penyaluran dana transfer ke daerah, khususnya DAU dan DAK, agar benar-benar dapat mendukung pembangunan daerah. Pemerintah pusat juga diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana transfer tersebut, sehingga alokasi anggaran yang diberikan kepada daerah dapat dimanfaatkan secara lebih tepat sasaran, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga turut memengaruhi belanja modal, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, atau variabel ekonomi dan fiskal lainnya. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat memperluas periode pengamatan dan menggunakan metode analisis yang lebih beragam agar menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan mampu menjelaskan belanja modal secara lebih mendalam.

Referensi :

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Citra, Y., & Kurnia. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13(3), 1–23. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Darmawati, S. S., Laudy, N. G., Sudaryono, S., & Mujiyani, M. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017-2023. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 22–32. <https://doi.org/10.56127/jaman.v5i1.2114>
- Dwi Putri Handayani. (2020). UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL DI KAB / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH.
- Febriansyah Putra, L., Mubiarto, N., & Embun Baining, M. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 3(2), 71–89. <https://doi.org/10.30631/jisacc.v3i2.2024>
- Ginting, E. M. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umu (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah. 4(3), 4869–4881.
- Heriston, S., & Putri, A. A. E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(3).
- Hinaya, muhammad syukri &. (2019). *JEMMA | JURNAL OF ECONOMIC* ., 2(4), 30–37.
- Indrianingrum, H., & Priyono, N. (2023). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magelang pada Tahun 2006–2021. *Economina*, 2(1), 1210–1221.
- Novita, H., Purba, A. Y. S. A., Perangin-Angin, E. S. D. B., Caroline, E. A., & Zai, J. K. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2018–2020. *OWNER: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 2156–2166.
- Pratama, S. ayem & desy. (2018). TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2011-2016. 2(2), 169–182. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987>
- Putri, E. S., & Mauliyah, N. I. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2018–2020). *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2(2), 108–117.
- Rahmadhani, F. K. (2019). *Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer*

- terhadap Pendapatan Per Kapita di Kota Medan. Universitas (tidak disebutkan).*
- Romadhon, S. W., & Aji, T. S. (2021). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Independent Journal of Economics*, 1(1), 41–55.
- Saputri, T. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan DanaAlokasi Umum (Dau) Terhadap Pendapatan PerKapita Melalui Belanja Modal Sebagai VariabelIntervening Pada Wilayah IndustriPeriode 2015-2022. *School of Electronics and Computer Science*.
- Sari, D. M. M. Y., & Wirama, D. G. (2020). Pengaruh PAD, DAU dan DAK pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 2065–2092.
- Sari, P. P. P., Riany, M., Paramita, E. J. S., & Sundaning, E. K. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Provinsi Jambi 2009–2017). (*Nama Jurnal Tidak Tercantum Jelas*).
- Yustriawan, D. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *OWNER: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 717–725.